

## **Edukasi Gender Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan**

**Setyasih Harini**

**Universitas Slamet Riyadi**

### **Abstrak**

Sistem demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warganegara untuk menggunakan hak politiknya baik memilih maupun dipilih. Peluang yang diberikan oleh sistem demokrasi bagi perempuan belum terlaksana dengan baik. Kurangnya kepercayaan diri dari perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ditunjang oleh stereotip dari masyarakat masih menjadi kendala. Perempuan masih dilabeli sebagai individu yang lemah, irasional, emosional yang dikaitkan dengan biologisnya. Keterpilihan perempuan dalam politik lebih sering diidentikkan dengan latar belakang keluarga bukan karena kapasitas dan kemampuannya. Kekuasaan yang diperoleh perempuan dianggap karena pemberian dari politisi sebelumnya yang masih memiliki hubungan kekerabatan baik secara vertikal maupun horisontal. Kemampuan dan kapasitas perempuan sebagai individu kurang mendapat apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat. Tulisan ini hendak memaparkan pentingnya edukasi politik gender guna meningkatkan partisipasi perempuan guna menghindari praktek politik kekerabatan. Partai politik sebagai lembaga aspirasi dan inisiatif warga hendaknya menjalankan fungsinya dalam memberikan edukasi gender. Melalui edukasi gender diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Kata kunci: edukasi, gender, politik kekerabatan

### **PENDAHULUAN**

Perempuan menjadi pemimpin politik masih menjadi fenomena yang menarik. Para ilmuwan dan literatur populer masih memberikan gambaran bahwa perempuan dalam politik terutama pada level pengambil kebijakan masih menimbulkan pro dan kontra. Ketika perempuan tampil sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam suatu negara seperti yang dilakukan oleh Sirimavo Bandaranaike (Presiden Srilanka pada tahun 1960) menunjukkan kemampuannya dalam meruntuhkan atap kaca (glass ceiling). Tantangan sosial dan hambatan kelembagaan terhadap perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis dikenal dengan glass ceiling (Forster, 1999). Fenomena glass door, glass ceiling dan glass cliff pada dasarnya hendak menjelaskan bahwa perempuan seandainya bisa menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan atau kepemimpinan senior janganlah terlalu lama, sekadar memberikan pengalaman yang lebih cepat dalam menunjukkan kemampuan kepemimpinannya daripada laki-laki (McLaren, 2019). Perempuan yang menjadi pemimpin ditempatkan pada posisi yang kurang penting dalam sebuah organisasi atau institusi atau ketika lembaga berada pada kinerja buruk (Elsaid & Ursel, 2018), perempuan dianggap cenderung mengikuti model kepemimpinan sebelumnya (Kulich, 2015).

Tampilnya perempuan tersebut telah sesuai dengan demokrasi yang mengamanatkan adanya persamaan dan keseimbangan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam politik yang didasarkan persamaan derajat dalam semua lini maupun wilayah. Kehadiran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam panggung politik semakin meningkat. Pemilihan umum tidak hanya menjadi domain laki-laki namun juga perempuan untuk menunjukkan kader-kader politiknya yang potensial untuk duduk dalam posisi penting dalam politik terutama sebagai pengambil keputusan. Tampilnya perempuan sebagai pemimpin dari kader-kader partai politik menggambarkan pencapaian kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Seperti yang disampaikan oleh Peter G Northouse (2014) bahwa kepemimpinan politik merupakan suatu proses yang dialami oleh seseorang untuk mempunyai pengaruh dalam suatu organisasi dengan cara menggerakkan individu lain untuk meraih tujuan bersama. Pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif secara langsung yang diikuti oleh warga negara dalam lingkup administrasi tertentu menjadi prasyarat mewujudkan otonomi daerah. Semakin baik kepala daerah atau anggota parlemen yang dihasilkan melalui pilkada dapat memperlancar pelaksanaan demokrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan mengenai peran perempuan sebagai pemimpin politik tidak dapat dipisahkan dari perspektif gender yang berkaitan dengan konstruksi sosial budaya serta ekonomi. Oleh karena itu wacana kepemimpinan perempuan dalam bidang politik pada mulanya diinisiasi sebagai wujud kegelisahan subyektif yang disuarakan oleh aktivis perempuan yang akhirnya mencuat sebagai hidangan segar dalam setiap pemilu maupun pilkada. Dalam konteks ini feminisme dimaknai sebagai kesadaran akan posisi dan peran perempuan yang masih rendah atau minim dibanding laki-laki sehingga berakibat pada ketimpangan gender, subordinasi dan kekerasan (Arifia, 2006:10; Duman, 2012). Dengan menggunakan konsep gender, para feminis hendak menyampaikan adanya hubungan kekuasaan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan, bagaimana relasi tersebut terbentuk dan berjalan.

Secara pragmatis, sejarah Nusantara mencatat kemampuan perempuan untuk tampil menjadi pemimpin. Para perempuan tersebut telah menunjukkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi pemimpin yang amanah, disegani, dan mampu memberika keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Semasa kerajaan Nusantara masih tumbuh, domain politik sebagai jejaring laki-laki terkoyakkan oleh beberapa penguasa yang beridentitas perempuan berhasil menghantarkan rakyatnya pada suatu masa kejayaan. Diantaranya adalah Ratu Shima, Sanggramavijaya, Dharma Prasada Tungadewi (tangan kanan Erlangga), Ken Dedes seorang tokoh perempuan dari kerajaan Singasari yang berhasil sebagai “dalang” peralihan kekuasaan dari Tunggal Ametung ke Ken Arok (Saraswati, 2016). Ratu Kalinyamat dari pesisir utara Jawa juga menggambarkan sosok penguasa perempuan yang sangat ditakuti bukan hanya oleh rakyatnya bahkan para perampok. Kepopuleran Ratu Kalinyamat disebabkan oleh kekuatan fisik yang pandai menggunakan senjata dan spiritual yang dimilikinya (Sugiarti, Hidayah, 2019; Rejeki, 2019)

Gambaran kekuatan di balik kelembutan yang dimiliki oleh para pemimpin perempuan Nusantara tersebut menjadi motivasi bagi generasi sekarang. Konstruksi sosial masyarakat yang telah terbangun dalam bentuk nilai-nilai patriarkhis tidak semata-mata menjadi penghalang bagi perempuan untuk menunjukkan kapasitasnya. Masyarakat Surakarta sebagian masih mengamini dunia politik masih menjadi domain bagi laki-laki. Dunia politik tidak dapat dilepaskan dari

proses pembuatan kebijakan yang digunakan bagi seluruh warga guna memenuhi kepentingannya. Politik juga diidentikkan sebagai organisasi kelembagaan yang sarat akan perebutan kekuasaan dan kepentingan. Kondisi demikian tentu saja tidak layak bagi perempuan yang secara garis besar dikaitkan dengan kondisi biologisnya. Kemampuan perempuan seakan dipertanyakan diantara percaturan dan perebutan kekuasaan dan kepentingan. Logika perempuan dieliminasi guna mengangkat suatu keyakinan bahwa itulah yang dimiliki laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat, politik sangat penting karena korelasinya dengan kebijakan yang mengatur sekaligus memberikan perlindungan dan tatanan sosial yang lebih baik. Politik berkaitan dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Politik sekaligus bicara mengenai kebijakan yang diambil oleh para politisi sekaligus upaya mencari resolusi konflik (Fanny dan Adepoju Oluwasanumi, 2014), Kesempatan untuk melakukan perjuangan tersebut diberikan kepada laki-laki dan perempuan sehingga diperlukan partisipasi politik. Studi ini akan melihat bahwa perjuangan untuk meraih kekuasaan dan partisipasi politik juga merupakan hak bagi perempuan. Mimatun Nasihah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa munculnya perempuan sebagai pemimpin bukan hanya ditentukan oleh partai politiknya atau pendidikan tinggi. Kesadaran politik ditentukan oleh seberapa paham perempuan terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.

Di sinilah muncul perdebatan bahwa perempuan menjadi pemimpin disebabkan karena unsur pemberian (given) bukan berdasarkan kemampuan (effort). Ketika perempuan berhasil menduduki posisi sebagai pengambil keputusan biasanya akan muncul pergunjingan dalam masyarakat siapa aktor yang ada di belakangnya, dari keluarga siapa bahkan dari mana asal partainya. Studi ini akan melihat kedua perspektif yakni given yang dikaitkan dengan politik kekerabatan dalam konteks pelaksanaan demokrasi dan effort yang merujuk kapasitas perempuan sebagai modal kapital untuk menjadi pemimpin yang dikehendaki rakyat. Salah satu jalan yang harus dilalui oleh perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politiknya adalah melalui edukasi yang sangat diperlukan guna menepis anggapan miring masyarakat terhadap potensinya.

### **Politik Kekerabatan Suramkan Demokrasi**

Sesuai dengan rumusan pembukaan UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat 2 yakni kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi. Prinsip kehidupan bernegara yang demokratis secara yuridis menunjukkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan. Politik kekerabatan sudah dan masih menjadi fenomena umum dalam sistem demokrasi dengan berbagai variasi kuantitasnya. Fenomena yang dikaji oleh para peneliti dalam lingkup politik dinasti lebih memberikan gambaran terhadap peran dan posisi perempuan sebagai pejabat publik baik sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. Beberapa kajian para peneliti sebelumnya dapat dilihat pada kepemimpinan politik perempuan dari Thailand (Sinsonboon dan Rujira Rojanapeansatith, 2018), Pakistan (Adler, 1996), Filipina (Tadem dan Tadem, 2016), bahkan negara besar seperti Amerika Serikat juga ada (Bryan T. Cranston, 2016). Pada masa awal negara demokrasi, praktek politik dinasti telah menjadi suatu kekuatan politik yang terjadi di beberapa negara. Alexandra Cirone (2018) menjelaskan adanya praktek politik dinasti dari anggota parlemen negara-negara besar. Anggota parlemen Amerika Serikat pada tahun 1800,

15% diantaranya merupakan praktek politik dinasti, negara Prancis ada sekitar 20% pada tahun 1880, dan sekitar 37% di Inggris pada tahun 1868.

Sementara Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015) menyampaikan bahwa praktek politik dinasti negara-negara Asia cenderung lebih tinggi, diantaranya Jepang dengan 20% dan Filipina 40%. Politik kekerabatan masih menjadi perbincangan menarik sampai saat ini terlebih lagi menjelang pelaksanaan pilkada serentak bulan Desember. Praktek politik seperti ini yang masih menjamur mencerminkan masih lemahnya lembaga partai politik terutama ditinjau dari fungsi-fungsinya. Praktek politik kekerabatan atau politik dinasti menjadi jembatan untuk memperpendek perjuangan partai politik dalam memenangkan kontes politik serta menjamin eksistensi rezim tertentu. Secara nasional fenomena tersebut masih menjamur seperti Ratu Atut Choisyah beserta keluarga dan kerabatnya yang sempat menjabat pada berbagai lini pemerintahan yang strategis di Banten, Propinsi Jawa Barat, Dinasti Cikeas juga menunjukkan sederet nama yang memiliki kaitan dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono, Propinsi Jawa Tengah juga diwarnai dengan politik dinasti dari mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, mantan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harri Sarundajang, Kediri, Gowa Sulawesi Selatan, dan Lamongan (Nurhidayati, 2014; Kenawas, 2016).

Beberapa daerah yang menunjukkan adanya praktek politik dinasti sulit dilepaskan dalam negara yang menganut demokrasi tidak sehat. Sistem pemilu yang masih terfokus dan berorientasi pada figur kandidat (Candidate Center Election) sebenarnya lebih memberi keuntungan bagi keluarga yang pernah terjun dalam politik mengingat eksistensinya telah dikenal secara luas oleh publik. Sehingga politik dinasti lebih mudah berkembang dalam masyarakat yang menganut demokrasi karena keunggulan yang dimiliki oleh petahana, desentralisasi dalam rekrutmen serta sistem pemilu yang berpusat pada kandidat (Smith, 2012). Demokrasi yang ditandai dengan pemilu menjadi sebuah “permainan tertutup” karena tidak fair dan tidak bebas dari pengaruh ikatan kekerabatan. Kekuatan yang dimunculkan oleh sekelompok tertentu menutup dan mengontrol akses terhadap pemilihan politik aktor pemerintah (Ockey, 2015).

Politik dinasti atau politik kekerabatan dalam sampai sekarang masih dimaknai secara beragam. Politik dinasti merujuk pada ikatan kekeluargaan yang dimiliki oleh seorang politisi dengan politisi sebelumnya (Martinez, 2010). Politik dinasti juga dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari upaya sekelompok elit untuk mempertahankan kekuasaan yang di dalamnya masih memiliki ikatan kekeluargaan dan berhasil memonopoli kekuasaan tersebut (Querobin, 2011). Kedua pendapat tersebut diperkuat oleh Asako (2012) yang menyatakan terjadinya politik dinasti ketika ada seseorang yang berhasil mendapat kekuasaan karena kerabatnya telah dan pernah menduduki jabatan politik sebelumnya. Dari ketiga pendapat tersebut jelas sekali menunjukkan adanya relasi yang terbentuk dalam domain kekuasaan antara penguasa sekarang dengan pejabat politik era sebelumnya.

Relasi yang terbentuk dalam ikatan kekeluargaan tersebut jika dilihat dari sifatnya ada yang vertikal dan horisontal. Politik dinasti dikatakan memiliki tipe vertikal ketika pejabat politik yang saat ini menjabat merupakan anak atau keturunan langsung dari politisi sebelumnya. Tipe ini lebih melihat adanya ikatan darah yang ditunjukkan secara langsung maupun tidak dalam kurun waktu tertentu. Untuk yang tipe horisontal terjadi ketika pejabat politik sekarang merupakan suami atau istri dari pemangku jabatan politik sebelumnya (Guritno, 2018). Ikatan

kekeluargaan inilah yang menjadikan permasalahan bagi seorang individu untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu khususnya hak dipilih. Poin penting ikatan kekeluargaan inilah yang kemudian mendasari bahwa bagi individu yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang pernah terjun dalam dunia politik memiliki kesempatan besar untuk menduduki jabatan politik pada periode mendatang. Di sini politik kekerabatan dirasa lebih sesuai dibanding politik dinasti guna menghindari konotasi negatif terhadap sistem politik saat ini yang sudah tidak lagi berbentuk kerajaan.

### **Partisipasi Politik Perempuan**

Pandangan gender mengasumsikan bahwa perempuan merupakan irasional, emosional, memerlukan pertimbangan sehingga tidak bisa menjadi pemimpin politik (Hidayati dan Nellis Mardiah, 2018). Beberapa penelitian lain juga menyebutkan prasangka negatif, stereotip, diskriminasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik (Heilman, 1983; Rudman & Glick 2001; Eagly & Karau, 2002). Perempuan hanya cocok menjadi pemimpin dalam industri jasa seperti pendidikan, kesehatan serta pegawai pemerintah (Gipson, et.al, 2017). Beberapa riset terdahulu tersebut memberikan gambaran masih adanya keraguan terhadap perempuan untuk tampil menjadi pemimpin politik. Keraguan terhadap kemampuan perempuan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman namun cenderung dikaitkan dengan kondisi biologisnya. Pemahaman yang negatif atau setidaknya netral terhadap kemampuan perempuan masih mengarah pada bias gender yakni kesempatan dan peluang yang diberikan dalam panggung politik lebih ditujukan untuk menjadi pemain bukan dalang. Kehadiran perempuan dalam kancah politik menurut literatur dan para ahli tersebut sekadar memenuhi prasyarat agar layak dianggap sebagai pelaku dan pengikut setia demokrasi.

Perbincangan perempuan sebagai pemimpin politik yang semakin marak tidak terlepas dari pandangan kaum feminis. Feminisme yang perkembangannya terbagi menjadi tiga gelombang pada dasarnya hendak menyuarkan hak politik yang hendaknya dimiliki seorang perempuan (gelombang pertama), memperjuangkan kesamaan atas akses pekerjaan dan pendidikan (gelombang kedua), dan pencapaian posisi dalam panggung politik bagi perempuan (gelombang ketiga) (Srilatha Batiwala, 2010). Melalui ketiga gelombang tersebut feminisme hadir untuk mengkonstruksi ulang tatanan sosial masyarakat yang selama ini membelenggu perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Penulis mengutip pendapat dari Kholid Zulfa (2004) mengenai konstruksi tatanan sosial masyarakat terkait kepemimpinan yang terdapat tiga hal yakni: teori genetis yang menerangkan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk dan karena keturunan tersebut maka ada persamaan bakat. Sebaliknya teori sosial justru melihat bahwa pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan sehingga setiap individu memiliki potensi dan peluang untuk menjadi pemimpin meskipun bukan berasal dari keturunan pemimpin. Sementara teori ekologis menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya bahwa pemimpin itu dilahirkan artinya sejak dalam kandungan telah memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Sejalan dengan itu, dalam perkembangannya dengan pendidikan yang dimilikinya dapat memperkuat potensi dan bakat.

Sesuai dengan ketiga pendapat tersebut maka kepemimpinan berkaitan dengan pemberian (given) dan usaha (effort). Pemberian dimaknai sebagai potensi dan bakat yang telah diterima seseorang sejak masih bayi bahkan dalam kandungan yang bisa membentuk menjadi pemimpin

karena dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan. Dari ketiga pandangan di atas tidak ada yang mencantumkan prasyarat biologis untuk menjadi seorang pemimpin. Ironisnya, budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat justru menjustifikasi secara negatif terhadap perempuan. Pandangan negatif terhadap perempuan lebih dikaitkan dengan ciri-ciri biologisnya, kurang rasional, emosional, kurang kompeten dalam menghadapi masalah umum sehingga kurang populer dalam ranah publik. Budaya yang patriarkis mengkonstruksi bahwa politik menjadi milik dan wilayah laki-laki sehingga kelompok inilah yang layak sebagai sumber daya dalam politik pemerintahan. Konstruksi budaya yang seperti itulah menjadikan perempuan mampu menjadi pemimpin politik meskipun terkendala dalam jejaring laki-laki (Fadhli, 2004; Tadem dan Tadem, 2016). Perempuan dituntut untuk menunjukkan kemampuan, potensi dan bakatnya kepada lingkungan guna menepis glass ceiling yang masih sering dimunculkan dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan kebijakan.

### **Diskusi**

Pemahaman politik masyarakat saat ini masih berproses untuk lebih menerima kehadiran dan peran perempuan dalam politik. Partisipasi politik perempuan masih perlu ditingkatkan baik dalam parlemen maupun kepala daerah. Rendahnya partisipasi politik perempuan tidak terlepas pada pandangan miring bahwa kekuasaan praktis membutuhkan perisai dan payung dari laki-laki. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa *given* merupakan salah satu faktor yang perlu dimiliki perempuan untuk bisa masuk dalam lingkaran politik. Unsur *given* inilah yang dalam konteks kekinian lebih dikenal sebagai politik kekerabatan atau politik dinasti. Praktek politik kekerabatan seringkali dimaknai secara negatif. Politik kekerabatan memiliki akar feodalisme dan tradisi monarki (Siti Zuhro, 2005). Praktek politik kekerabatan membangun dan memperkuat jejaring dalam ruang kekuasaan untuk menguasai dan mematikan praktek demokrasi yang belum mapan (Martien Herna Susanti, 2017). Politik dinasti dapat menyebabkan ketidakadilan sosio-ekonomi (Teresa Encarnacion Tadem dan Eduardo Tadem, 2016). Argumentasi lain menyebutkan bahwa negara demokrasi yang mempraktekkan desentralisasi rentan terhadap politik kekerabatan yang berujung pada korupsi (Lessmann, C. & Markwardt, G, 2010). Politik kekerabatan memperlemah akuntabilitas finansial pada tingkat pemerintahan lokal (Nurritomo dan Rosieta, 2014). Praktek politik kekerabatan menghambat pembangunan ekonomi serta memperlemah persaingan dalam pemilu (Asako et, al, 2015).

Politik kekerabatan menawarkan kelompok reformis untuk memperpanjang perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif (Ronald U Mendoza, Edsel L. Beja Jr, Victor S. Fenida, dan David B. Yap, 2012). Nur Iman Subono dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (2020) memaparkan bahwa politik kekerabatan menjadi salah satu jembatan untuk menyeberangkan perempuan untuk berpolitik. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2018, secara keseluruhan terdapat 342 kandidat perempuan namun yang akhirnya terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya ada 31 atau 9,02 persen yang perempuan. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan meskipun belum banyak dibandingkan dengan tahun 2017 pada prosentase 5,90 dan 2015 pada 8,7 persen. Kisaran angka tersebut jika dilihat pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya maka muncul empat klaster. Pertama, mayoritas keberhasilan perempuan sebagai kepala daerah tidak terlepas dari adanya ikatan kekeluargaan dengan pemimpin sebelumnya pada angka 17 dari 31 atau 54,84 persen. Kedua, perempuan



berhasil menjadi kepala daerah karena berasal dari kader partai dengan angka 15 dari 31 atau 48,39 persen. Ketiga, pada angka 13 dari 31 atau 41,94 persen dan yang terakhir petahana dengan angka sembilan dari 31 atau 29,03 persen. Sementara temuan dari Atika Nur Kusumaningtyas, Kurniawati Hastuti Dewi, Esty Ekawati, Fathimah Fildzah Izzati (2017) bahwa politik kekerabatan masih menjadi pintu utama bagi perempuan untuk berkompetisi dalam pilkada langsung. Dari paparan tersebut menunjukkan partisipasi politik perempuan sampai pada level pemerintahan lokal yakni kepala daerah dan anggota parlemen justru ditunjang oleh praktek politik kekerabatan walaupun pada tataran tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Keberhasilan perempuan sebagai politisi bisa saja ditunjang karena praktek politik kekerabatan namun masih perlu dilihat lagi pada beberapa faktor lain, diantaranya adalah kapasitas. Seperti yang telah dijelaskan semula bahwa perempuan menjadi politisi tidak melulu karena unsur given, pemberian yang kemudian dikaitkan dengan politik kekerabatan. Keberhasilan perempuan sebagai politisi juga sebagai perwujudan dari effort, upaya yang dilakukannya. Salah satu upaya yang menunjukkan kapasitas perempuan sebagai pemimpin yang amanah dapat dilihat melalui buah edukasi politik yang pernah diterimanya yakni keputusan atau kebijakan. Pemimpin menjadi aktor penggerak organisasi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan aktivitas dari organisasi yang dipimpinya termasuk pencapaian tujuan agar lebih efektif dan efisien. Untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinya. Pemimpin disebut efektif jika memiliki kemampuan untuk membuat keputusan bisa diterima oleh seluruh anggota yang dipimpinya dan disepakati sebagai hasil dari keputusan bersama (Olivianti, 2014).

Untuk mendapatkan pemimpin politik yang efektif, partai politik dituntut melaksanakan fungsinya. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik pada kedudukan yang strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar penyangga berlangsungnya demokrasi. Proses rekrutmen dan pengkaderan partai tidak terlepas dari peran partai politik dalam memberikan edukasi. Partai politik juga menanggung tanggung jawab untuk mendewasakan masyarakat secara politis guna menghindari konflik. Partai politik yang ada sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan kepentingannya. Fungsi partai politik untuk memberikan penyadaran dan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya telah tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2011.

Fungsi partai politik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan. Adapun fungsi partai politik sesuai dengan regulasi tersebut adalah pertama, meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga untuk ikut membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan serta membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan etika dan karakter Pancasila. Melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi yang dimaknai sebagai pemahaman dalam menggunakan hak politiknya.

Edukasi politik seperti itulah yang masih diperlukan untuk masyarakat terutama perempuan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh partai dalam perekrutan kader dalam kampanye sekaligus memberikan edukasi bagi perempuan. Harapannya, perempuan yang menjadi kader partai benar-benar memahami politik yang bukan hanya dimaksudkan sebagai kepemilikan kekuasaan namun kepemimpinan yang humanis sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Partai politik bukan melakukan sebaliknya, mendekati rakyat ketika hendak memintanya untuk mendulang suara dalam pemilu.

### **Kesimpulan**

Partai politik pada era sekarang hendaknya lebih banyak melakukan fungsinya terutama dalam mendewasakan masyarakat yang terkait dengan demokrasi. Edukasi politik sangat diperlukan bagi perempuan agar lebih berpartisipasi. Melalui edukasi gender dapat menghindarkan perempuan yang berhasil meraih kekuasaan tidak mendapat stigma miring sebagai “hadiah”. Edukasi gender juga memberikan pencerahan dan motivasi bagi perempuan untuk lebih berani berkompetisi sesuai dengan kapasitas dalam meraih kekuasaan agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Edukasi gender sekaligus membuktikan bahwa perempuan berpolitik tidak semata-mata karena berada dalam lingkaran politik kekerabatan baik secara vertikal maupun horisontal.

### **Daftar Pustaka**

- Adler, Nancy J, (1996). *Global Women Political Leaders: An Invisible History, An Increasingly Important Future*, *Leadership Quartely*, 7(1), 133-161.
- Arifia, Gadis (2006). *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Gramedia.
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). *Dynastic Politicians: Theory And Evidence From Japan*. *Japanese Journal Of Political Science*, 16(1), (5–32).
- Asako, Yasushi. et.al. (2012). *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*, Waseda University Organization for Japan-US Studies. Working Paper No. 201.
- Batiwala, Srilatha, (2010). *Feminist Leadership for Social Transformation: Clearing the Conceptual Cloud*, India: SCRA.
- Cirone, Alexandra, (2018). *Political Dynaties In The European Parliament*, Assistant Professor, Department Of Government, Cornell University.
- Cranston, Bryan T. (2016). *Political Dynasties In a Democracy: Why Political Families Exist And Persist In The United States Of America*, 24th World Congress Of Political Science - “Politics In a World Of Inequality”, International Political Science Association, 23 To 28 July 2016, Poznan, Poland.
- Duman, Fatih, (2012). *The Roots of Modern Feminism: Mary Wollstonecraft and the French Revolution*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 2 No. 9, (75-89).
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). *Role Congruity Theory Of Prejudice Toward Female Leaders*. *Psychological Review*, 109, (573-598).
- Elsaid, Eahab, and Nancy D. Ursel. 2018. *Re-examining the Glass Cliff Hypothesis using Survival Analysis: The Case of Female CEO Tenure*. *British Journal of Management* 29: (156–170).
- Fadhli, Ashabul, (2004). *Tinjauan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Perspektif Feminisme*, *Jurnal Islam dan Demokrasi*, Vol. 1 No. 4 (85-98).



- Fanny Kinge Ruth dan Adepoju Oluwasanumi, (2014). Women Education and Political Participation in the South West Region of Cameroon: An Empirical Analysis, *Public Administration Research*, Vol. 3, No. 2, (144-153).
- Forster, Nick. (1999). Another 'Glass Ceiling'?: The Experiences of Women Professionals and Managers on International Assignments. *Gender, Work & Organization* 6: (79–90).
- Gipson, Asha N., Danielle L Pfaff, David B. Mendelsohn, Lauren T. Catenacci, W. Warner Burke, (2017). Women and Leadership: Selection, Development, Leadership Style and Performance, *the Journal of Applied Behavioral Science*, Vol. 53(1), (32-65).
- Guritno, Danur Condro, Bhimo Rizky Samudro, dan Albertus Magnus Soesilo, (2018). Does Political Dynasty Cause Poverty?, *Jejak, Journal of Economics and Policy*, (429-446).
- Hayati, Nur, (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, *Orbith*, Vol. 10, No. 1 (18-21).
- Hidayati, Rahma dan Nellis Mardiah, (2018). Gender dan Gaya Kepemimpinan Perempuan di Jabatan Publik: Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, *Community*, Vol. 4 No. 2, 236-246.
- Heilman, M. E. (1983). Sex Bias in Work Settings: The lack of Fit Model. *Research in Organizational Behavior*, 5, (269-298).
- Kenawas, Yoes C, (2015). The Rise of Political Dynasty in Democratic Society, Work Paper, the Arryman Fellow Symposium, Indonesian Scholarship and Research support Foundation from PT Djarum, Bank BCA, PT Adaro, the William Soeryadjaya Foundation, the Rajawali Foundation, and the Ford Foundation, (1-58)..
- Kulich, Clara, Vincenzo Iacoviello, and Fabio Lorenzi-Cioldi (2015). Refining the conditions and causes of the glass cliff. In *Gender and Social Hierarchies: Perspectives from Social Psychology*. Edited by Klea Faniko,
- Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One Size Fits All? Decentralization, Corruption, And The Monitoring Of Bureaucrats. *World Development*, 38(4), (631–646).
- Martinez, Lisa M. (2010). Politizing the Family: How Grassroots Organizations Mobilized Latinos for Political Action in Colorado. *Latino Studies*, 8 (Winter), No. 4, (463-484).
- McLaren, Helen, Cassandra Star dan Ida Widianingsih, (2019). Indonesian Women in Public Service Leadership: A Rapid Review, *Social Sciences Review*, (1-16).
- Nasihah, Mimatun, (2018). Increasing Political Awareness through Political Education for Women in Sambeng Sub-District, Lamongan District, *Sosio Didactica, Social Science and Education Journal*, 5(2), (85-92).
- Northouse, G. Peter (2014), *Introduction to Leadership: Concepts and Practice*, Western Michigan University, SAGE, Los Angeles
- Nuritomo, & Rossieta, H. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Political Ynasties And Financial Performance Of Regional Government In Indonesia). *Working Paper*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Ockey, James, (2015). Thai Political Families: The Impact of Political Inheritance, Department of Political Science, Canterbury University, Journal Cambridge, *Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, (1-21).
- Olivianti, Beby dan Lala M Kolopaking, (2014). Hubungan Gaya Kepemimpinan Lurah dengan Kualitas Pelayanan Kelurahan, Studi di Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Selatan, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 02 No. 03, (135-145).
- Querubin, Pablo. (2011). Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines, paper dipresentasikan pada APSA Annual Meeting.
- Rejeki, Suyekti Kinanthi, (2019). Peranan Ratu Kalinyamat dalam Perkembangan Kota Jepara (1549-1579), *Sosio-Ekons*, Vol. 11, No. 2 (174-182).

- Saraswati, Ufi, (2016). Kuasa Perempuan dalam Sejarah Indonesia Kuna, Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Perempuan dalam Arus Sejarah tanggal 21 April 2016 di Universitas Negeri Malang
- Sinsonboon, Busabar Dan Rujira Rojanapeansatith, (2018). Political Women Leadership Of Thai Women: The Era Of Globalization, *Humanities And Social Sciences Review*, 08(02), (399-410).
- Smith, Daniel Markham. (2012). *Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies*. Ph.D diss. University of California.
- Sugiarti, Hidayah Budi Qur'ani, (2019). Kekuatan Tokoh Perempuan dalam Novel Ratu Kalinyamat Karya Murtadho Hadi, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 19, No. 1, (18-26).
- Susanti, Herna Marten, (2017). Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia, *Journal Of Government And Civil Society*, Vol. 3 No. 1, (111-119).
- Tadem, Teresa S. Encarnacion Dan Eduardo C Tadem, (2016). Political Dynasties In The Philippines: Persistens, Patterns, Parnial, Problems, *Southeast Asia Research* 24(3), (328-340).
- Zulfa, Kholid, (2004). Belenggu Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Politik, *Muzawa*, Vol 4, No. 1 (67-78).
- Zuhro, Siti (2005). Perjuangan Demokrasi Melalui Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi Dalam Pilkada Di Jember, *Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Lipi, Vol. Xxxi, No. 2.